

Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pantai Kenjeran oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam Pengembangan Kawasan Perikanan

Adhitya Yudha Satria¹, Sri Wibawani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
adhityayudhas@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to examine the empowerment of Kenjeran coastal fishermen by the Surabaya City DKPP in developing fishery areas. The background of this writing is that several fishermen empowerment programs carried out by the City Government of Surabaya have not run optimally. This is further exacerbated by conditions of limited accessibility and other social tensions. This study refers to the theory of Mardikanto & Soebianto (2017:111-112) in which there are 9 (nine) indicators of community empowerment, namely 1) improving education, 2) improving accessibility, 3) improving actions, 4) institutional improvement, 5) business improvement, 6) income improvement, 7) environmental improvement, 8) life improvement, and 9) community improvement. This research method uses a qualitative descriptive method. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the empowerment that has been carried out by DKPP Kota Surabaya in developing regional fisheries in the empowerment process that has been carried out has been considered quite successful, being able to increase the catch of fishermen so that it is very helpful for fishermen and can improve the welfare of fishermen in general even though in practice there are still deficiencies.

Keywords: *Empowerment, Fishermen, Development of Fishery Areas.*

ABSTRAK

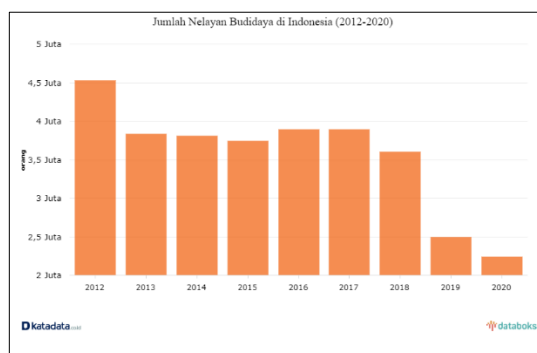
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan nelayan pesisir pantai kenjeran oleh DKPP Kota Surabaya dalam pengembangan kawasan perikanan. Latar belakang dari penulisan ini adalah beberapa program pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi terbatasnya aksesibilitas dan kesenjangan sosial lainnya. Penelitian ini mengacu pada teori Mardikanto & Soebianto (2017:111-112) yang terdapat 9 (sembilan) indikator pemberdayaan masyarakat yaitu 1) perbaikan pendidikan, 2) Perbaikan aksesibilitas, 3) perbaikan tindakan, 4) perbaikan kelembagaan, 5) perbaikan usaha, 6) perbaikan pendapatan, 7) perbaikan lingkungan, 8) perbaikan kehidupan, dan 9) perbaikan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan DKPP Kota Surabaya dalam pengembangan kawasan perikanan pada proses pemberdayaan yang dilakukan telah dianggap cukup berhasil, mampu meningkatkan hasil tangkapan para nelayan sehingga sangat membantu para nelayan dan bisa mensejahterakan nelayan pada umumnya meskipun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Nelayan, Pengembangan Kawasan Perikanan.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pantai yang sangat besar. Kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai ragam sumber daya hayati pesisir yang bervariasi seperti terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, ikan yang berlimpah serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5.8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan. Sebagai salah satu negara kepulauan yang didominasi oleh lautan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang perikanan dan kelautan. Potensi perikanan dan kelautan ini berperan penting dan strategis bagi pembangunan nasional Indonesia, karena mempengaruhi banyak aspek seperti ekonomi, keamanan, ekologi dan sosial. Selain itu, dampak langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan (Fauzuddin et al., 2019).

Besarnya potensi kelautan ternyata tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Problem yang terlihat pada kondisi sosial ekonomi nelayan sangat jauh berbeda dengan potensi sumber daya alamnya. Dalam kenyataannya kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan) dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Di negara Indonesia sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah pesisir menggantungkan kehidupannya pada hasil laut. Dengan kata lain apabila masyarakat tidak bekerja di bidang lain, maka mereka mengandalkan sektor kelautan maupun perikanan sebagai mata pencahariannya (Windasai et al., 2021). Adapun berikut jumlah nelayan di Indonesia:



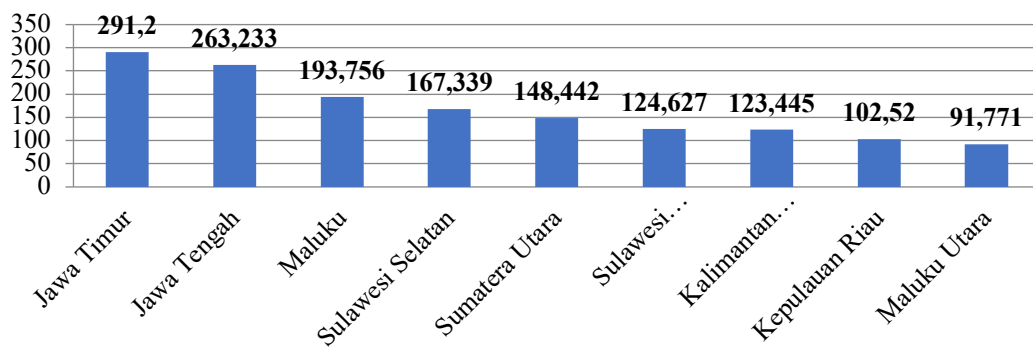
Gambar 1. Jumlah Nelayan Budidaya di Indonesia (2012-2020)

Sumber: Databoks (2022)

Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa jumlah nelayan budidaya di Indonesia mencapai 2,23 juta orang pada 2020. Jumlah itu turun 10,44% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2,49 juta orang. Berdasarkan provinsinya, jumlah nelayan budidaya di Indonesia paling banyak di Jawa Barat, yakni

sebanyak 379,98 ribu orang pada 2020. Sedangkan, jumlah nelayan budidaya paling sedikit berada di DKI Jakarta, yakni sebanyak 1,31 ribu orang. Berdasarkan jenisnya, jumlah nelayan budidaya tawar merupakan yang paling banyak, yakni mencapai 1,54 juta orang pada 2020, diikuti nelayan budidaya payau sebanyak 401,84 ribu orang, dan nelayan budidaya laut sebanyak 287,73 ribu orang. Adapun secara tren, jumlah nelayan budidaya di Indonesia cenderung menurun sejak 2012. Saat itu jumlah nelayan budidaya tercatat sebanyak 4,53 juta orang. Penurunan sangat signifikan mencapai 15,33% yakni menjadi 3,83 juta orang terjadi pada 2013. Jumlah nelayan budidaya pun terus menurun hingga 2020.

Berdasarkan data statistik terakhir KKP di website statistik.kkp.go.id, memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah nelayan terbanyak di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan grafik 10 (sepuluh) provinsi yang memiliki jumlah nelayan terbanyak di Indonesia pada tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik 10 Provinsi dengan Jumlah Nelayan Terbanyak Tahun 2021
 Sumber : Statistik.kkp.go.id (2021)

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah nelayan terbanyak di Indonesia yakni 291.200 orang. Dengan banyaknya jumlah tersebut Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian perikanan di Indonesia. Akan tetapi, dari banyaknya jumlah tersebut apabila ditinjau setiap tahunnya nelayan di Provinsi Jawa Timur. Menurunnya jumlah nelayan ini disebabkan kondisi rendahnya kesejahteraan yang dialami para nelayan, sehingga banyak masyarakat terutama generasi muda melabeli profesi masyarakat miskin dan tidak menjanjikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Statistik.kkp.go.id, 2021).

Menurut Chalid & Yusuf (2014) mendefinisikan kesejahteraan yaitu ketika seseorang berada pada kondisi sejahtera yang dilihat dari fisik, mental, dan sosial. Nelayan tradisional yang secara terbatas dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dikarenakan modal usaha yang sedikit, organisasi penangkapan yang cenderung sederhana, dan perlengkapan tangkap tradisional. Mereka hidup dengan berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pangan bukannya menginvestasikan kembali dalam rangka pengembangan skala usaha. Adanya kondisi ini disebabkan sarana yang terbatas, sumber daya manusia (SDM)

yang rendah, dan tidak terdapatnya regulasi yang berpihak pada para nelayan. Minimnya sarana berupa perlengkapan tangkap ikan, mempengaruhi tingkat produktivitas yang menjadi terbatas, yang akhirnya berimbas pada kesejahteraan dan pendapatan nelayan (Triyanti & Firdaus, 2016). Alhasil, tingkat kesejahteraan dan pendapatan nelayan dipengaruhi tingkat hasil tangkapan ikan.

Dalam menyikapi hal tersebut diperlukan kebijakan melalui pembangunan terpadu pada kawasan pesisir, dan adanya kerja sama dari semua pihak khususnya pelibatan nelayan dalam pembangunan kawasan pesisir (Anwar et al., 2019). Tindakan-tindakan ini menjadi bagian dari tanggung jawab dan peran pemerintah dalam perekonomian guna mengatasi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terealisasi.

Selama ini sudah terdapat regulasi untuk mengatur mengenai kesejahteraan nelayan dalam pengembangan kawasan perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Peraturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 Tentang Minapolitan, Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perikanan. Regulasi tersebut mengamanatkan pengembangan kawasan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah menuju industrialisasi kelautan dan perikanan.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang dalam struktur perwilayahannya ditetapkan sebagai Pusat Utama dan menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Pada wilayah Kota Surabaya, terdapat kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Pada wilayah pesisir ke arah laut, dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran intersulair maupun internasional, penangkapan ikan tradisional, dan wisata pantai Kenjeran. Sedangkan pada wilayah pesisir ke arah darat dimanfaatkan untuk permukiman, budidaya tambak ikan maupun garam, galangan kapal, pergudangan, militer, pelabuhan, dan wisata (Oktaviana, 2020).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Nelayan di Kota Surabaya Tahun 2016-2022

Sumber: DKPP Kota Surabaya (2022)

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (Orang)
1.	2016	2.266
2.	2017	2.066
3.	2018	2.045
4.	2019	2.033
5.	2020	1.976
6.	2021	1.800
7.	2022	1.896

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kota Surabaya yang berprofesi sebagai nelayan pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan pada beberapa tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016, jumlah nelayan di Kota

Surabaya sejumlah 2.266 orang, di tahun 2017 jumlah penduduk nelayan menurun menjadi 2.066 orang. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali terjadi penurunan nelayan dengan jumlah nelayan menjadi 2.033 orang. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kembali yakni 1.800 orang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 1.896 nelayan. Penurunan tersebut diakibatkan karena banyaknya SDM yang kini beralih untuk berkegiatan orientasi bukan laut. Misalnya guru, pegawai, buruh pabrik, dan lain-lain. Jumlah nelayan tersebut terbagi pada 61 KUB Nelayan dan jumlah perahu sebanyak 1.129 perahu. Nelayan tersebar di pesisir timur dan barat. Wilayah timur yaitu Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Mulyorejo. Sedangkan wilayah barat terletak di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo.

Pada umumnya nelayan Kota Surabaya melakukan penangkapan ikan dengan *sistem one day fishing* atau sehari operasi langsung pulang ke darat. Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun sebanyak 7.905,7 ton. Jenis ikan hasil tangkapan nelayan yaitu, Manyung, Kakap Putih, Teri, Peperek (ikan asin), Belanak, Gulamah, Layur, Pari Kembang dan untuk yang non-ikan seperti Udang Putih, Kepiting, Rajungan, Kerang Darah, Kerang Hijau, Cumi-cumi (DKPP Kota Surabaya, 2022).

Namun, permasalahan sosial, ekonomi dan ekologi pada kawasan pesisir merupakan permasalahan penting yang terikat satu sama lain. Salah satunya adalah keterkaitan faktor kemiskinan dan faktor pengelolaan lingkungan. Kondisi ini terjadi pada kawasan pesisir di Kota Surabaya. Tingkat kesejahteraan nelayan dan akses SDM di kawasan pesisir rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan nelayan di pesisir timur Kota Surabaya, sebanyak 29,30% masih dibawah UMK Kota Surabaya (A M Gai et al., 2018).

Selain itu, kondisi lingkungan semakin menurun akibat adanya perubahan iklim. Masyarakat pesisir, nelayan tangkap dan pembudidaya di tanah air telah mengalami dampak perubahan iklim di sektor perikanan salah satunya berkurangnya produktivitas perikanan karena rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang akibat kenaikan suhu permukaan air laut dan perubahan rezim air tanah (Suryawati et al., 2015). Rendahnya kesejahteraan dan SDM di kawasan pesisir Kota Surabaya serta adanya ancaman perubahan iklim menjadi penyebab langsung pada penurunan hasil produksi perikanan. Hal ini akan menyebabkan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan (Ardiyanto Maksimilianus Gai, 2020).

Di kawasan pesisir Kota Surabaya telah ditetapkan secara resmi sebagai kawasan pesisir sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan penangkapan ikan tradisional dengan jenis tangkapan ikan berupa ikan pelagis di area dekat Kota Surabaya dan ikan demersal pelagis di area sekitar Pulau Madura. Hal ini didukung dengan penetapan Kecamatan Bulak dan Kecamatan Mulyorejo sebagai kawasan dengan sektor basis dan sektor utama berupa kegiatan perikanan (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034). Sebagai kawasan pesisir, Kecamatan Bulak memiliki komposisi penduduk yang didominasi dengan nelayan. Pada Kelurahan Sukolilo Baru, persentase nelayan mencapai 40%.

Sedangkan di Kedungcowek mencapai 100% dan di Kenjeran mencapai 75%. Sehingga dalam Kecamatan Bulak, persentase nelayan mencapai 31% dari total seluruh penduduk.

Dalam bidang perikanan, nelayan di wilayah perencanaan mampu memperoleh tangkapan hingga mencapai 15 kilogram pada masa panen. Sehingga pada tiap bulannya, pendapatan nelayan ikan pelagis di wilayah perencanaan berkisar antara satu juta rupiah hingga mencapai sembilan juta rupiah. Jenis tangkapan ini meliputi beberapa komoditas unggulan seperti kepiting rajungan, bulu ayam, dan bulu entog. Bahkan untuk komoditas kepiting rajungan sudah diekspor keluar Surabaya. Selain komoditas perikanan, terdapat potensi sumber daya lain yang kurang dimanfaatkan. Komoditas tersebut berupa limbah cangkang kerang yang tersebar di kawasan tepi pantai di Kecamatan Kedung Cowek. Pada tahun 2017, terdapat 13.823 ton cangkang kerang dan hanya 26% yang telah dimanfaatkan untuk bahan baku kerajinan dan urugan. Padahal limbah cangkang kerang dapat diolah menjadi pupuk, bahan baku ternak, bahan baku batako, dan bahan baku katalis dalam pembuatan biodiesel. Adanya potensi ketersediaan sumber daya pesisir ini dimanfaatkan oleh sebagian penduduk Kecamatan Bulak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti kegiatan penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan juga penjualan ikan (DKPP Kota Surabaya, 2018).

Selain produk olahan ikan, penduduk di Kecamatan Bulak juga membuat olahan dari kupang serta kerajinan dari kerang. Penduduk di Kecamatan Bulak juga menjual makanan ataupun souvenir pada kawasan wisata Pantai Ria Kenjeran. Untuk mendukung kegiatan perikanan yang ada, dibangun fasilitas pendukung berupa SIB sebagai tempat pengolahan dan penjualan hasil tangkapan nelayan (Beritasurabaya.net, 2022). Namun pemanfaatan fasilitas ini masih kurang optimal karena jumlah masyarakat yang melakukan transaksi di SIB sangat terbatas. Hal ini juga berimbas pada sedikitnya jumlah pengunjung yang mengunjungi SIB tiap harinya (Fakhrudin, 2018). Berdasarkan gambaran kondisi eksisting di atas, maka diperlukan adanya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dan nelayan dalam pengembangan kawasan perikanan.

Dengan potensi yang dimiliki masyarakat pesisir pantai kenjeran, maka diperlukan pemberdayaan nelayan guna meningkatkan pengembangan kawasan perikanan. Untuk itu mereka perlu diberdayakan, sehingga mereka mampu menolong dirinya untuk *survive*, keluar dari jerat kemiskinan. Konsep pemberdayaan nelayan yang jelas, sistematis, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menjawab permasalahan nelayan di Kota Surabaya (Irwan et al., 2017). Dalam hal ini, DKPP Kota Surabaya sebagai *leading sector* khususnya di bidang perikanan dan kelautan memiliki fungsi untuk melaksanakan pemberdayaan nelayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses sosial yang terencana untuk memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dan

kemampuan kepada masyarakat serta menstimulasi dan memotivasi individu-individu agar mereka memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini ditunjang oleh upaya membangun aset material (ekonomi) untuk mendukung pengembangan kemandirian melalui organisasi atau kelembagaan sosial (Irwan et al., 2017). Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berbagai program pemberdayaan telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui DKPP seperti pemberdayaan istri nelayan dan bantuan perahu untuk nelayan hingga berupa bantuan subsidi solar (Surabaya.bisnis.com, 2021). Akan tetapi, melansir berita dari Suarasurabaya.net (2022) bahwa program pemberdayaan nelayan di Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperparah dengan pemberian insentif belum menghasilkan manfaat yang signifikan. Pernyataan tersebut diungkapkan secara langsung oleh Wakil Walikota Surabaya dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya di Hari Nelayan Nasional yang dikutip oleh Suarasurabaya.net (2022) sebagai berikut:

“Tahun lalu pemerintah mereka diberdayakan dan diberi insentif dengan besaran bervariasi untuk membantu program pemerintah kota. Kemarin ada beberapa pelatihan yang diberikan DKPP Kota Surabaya hanya beberapa bulan, lalu tidak ada aktivitasnya lagi. Ini perlu kita benahi supaya program lama berkelanjutan. Pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan ini, berdampak pada penghasilan nelayan, menjadi semakin memprihatinkan. Kami tawarkan untuk diberikan alat tangkap ikan. Masih negosiasi dan sedang dipikirkan mekanismenya agar tidak melanggar nomenklatur.” (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemberdayaan-nelayan-surabaya-mandek-pemkot-tawarkan-bantuan-alat-tangkap/> diakses pada 20 Desember 2022)

Menyikapi program pemberdayaan pada tahun 2021 yang tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Surabaya berencana mengalokasikan dananya menjadi bantuan alat tangkap. Adapun terkait plengsengan untuk tempat menjemur ikan yang dijanjikan Pemerintah Kota Surabaya, diketahui dana pembangunannya telah dianggarkan oleh DKPP Kota Surabaya pada tahun 2022. Padahal, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki *masterplan* atau dokumen perencanaan tata ruang untuk wilayah pantai yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 untuk pemberdayaan dan potensi warga nelayan.

Pada dasarnya program pemberdayaan dapat mencapai tujuan yang optimal dan efektif jika dirancang secara komprehensif. Dalam konteks ini *Asian Development Bank* (ADB), dalam Waris et al., (2018) mengemukakan syarat-syarat program pemberdayaan yang komprehensif harus menampilkan karakteristik: a) berbasis local, b) berorientasi peningkatan kesejahteraan sosial, c) berbasis kemitraan, d) bersifat holistik, dan e) berkelanjutan. Dengan orientasi seperti itu konsep

pemberdayaan diharapkan menjadi wacana alternatif dan strategi efektif dalam membangun masyarakat di kawasan pesisir pantai kenjeran.

Permasalahannya lainnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai masih menuai permasalahan. Bahkan dalam hal ini DKPP Kota Surabaya memberhentikan program pemberdayaan bagi para nelayan sebagaimana yang dikutip oleh Kampungberita.id (2022):

“Sejumlah perwakilan nelayan yang tergabung dalam Nelayan Surabaya Bersatu datang ke Gedung DPRD Kota Surabaya pada Rabu 23 Maret 2022. Semula para nelayan ini diundang untuk hearing di Komisi B, tapi batal. Ini karena Kepala DKPP (KPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti tidak hadir. Pembina II Nelayan Surabaya Bersatu, Amrozi Hamidi mengatakan, kedatangannya ke Komisi B, sebenarnya ingin menanyakan kepada Pemkot Surabaya, kenapa program pemberdayaan nelayan itu tidak diteruskan lagi oleh Kepala Dinas KPP yang baru. Padahal program yang dijanjikan Wali Kota Eri Cahyadi saat kampanye pada Pilkada Surabaya 2020 itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Surabaya.” (<https://kampungberita.id/program-pemberdayaan-disetop-dinas-kpp-nelayan-surabaya-tagih-janji-wali-kota/> Diakses pada 19 Desember 2022)

Berdasarkan berita di atas memperlihatkan bahwa pemberdayaan bagi nelayan diberhentikan oleh DKPP Kota Surabaya akibat pergantian pimpinan Dinas. Alhasil, karena pemberdayaan tersebut diberhentikan membuat para nelayan memprotes hal tersebut ke Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selain itu, melansir berita Kompas.com (2022) diketahui bahwa strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan yang masih belum *sustainable*. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi terbatasnya aksesibilitas dan kesenjangan sosial lainnya yang dirasakan oleh para nelayan menyebabkan sampai saat ini mereka masih berada di bawah garis kemiskinan dan kualitas hidup yang rendah.

Berdasarkan masalah tersebut, DKPP Kota Surabaya akan turut berupaya untuk melakukan pemberdayaan kembali kepada para nelayan dalam memberikan fasilitas dan peralatan serta bantuan terhadap para nelayan. Suatu program pemberdayaan harus diikuti dengan SDA dan SDM yang memadai sehingga dilakukannya pemberdayaan nelayan pesisir dalam pengembangan kawasan perikanan yang tentu saja berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir. Menurut Mardikanto (2014) terdapat enam hal yang perlu dicapai dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat sehingga nelayan pesisir perlu berperan langsung dalam mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang pemberdayaan nelayan pesisir pantai kenjeran oleh DKPP Kota Surabaya dalam

dalam pengembangan kawasan perikanan. Dari penjelasan dan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dikehendaki dan ingin dicapai adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi permasalahan yang dihadapi tentunya tidak terbatas pada faktor – faktor yang pernah terjadi di daerah lain ataupun pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, namun penelitian ini dimaksudkan agar memahami secara mendalam terhadap suatu kondisi yang kompleks dan dinamis sehingga peneliti berpendapat bahwa penelitian ini lebih cocok jika menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dimana wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara terstruktur tentang hal – hal yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model* dari Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3rd ed.)*, yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan pembahasan pemberdayaan dalam pengembangan kawasan perikanan selaras dengan pernyataan Mubyarto dalam Suryadi & Sufi (2019), bahwa konsep pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan potensi yang ada pada suatu daerah merupakan langkah tepat dalam mewujudkan sekaligus melaksanakan pembangunan pada suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat partisipasi (*participacy*), pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Disisi lain, pembahasan pemberdayaan oleh Mardikanto & Soebianto (2019) menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat merupakan agenda pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat yang ideal, yaitu kondisi yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima manfaat. Pemberi bisa menyalurkan tanggung jawabnya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Sementara penerima diharapkan mendapat manfaat program lebih berdaya dalam segala aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, aspek kehidupan lainnya untuk mencapai kesejahteraan. Pada akhirnya, pemberdayaan merupakan upaya untuk merubah perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat secara bertahap.

Proses pemberdayaan nelayan pesisir pantai kenjeran oleh DKPP Kota Surabaya dalam pengembangan kawasan perikanan mengacu pada teori Mardikanto & Soebianto (2017:111-112) di mana keseluruhan indikator tersebut untuk

mendesripsikan tercapainya tujuan pemberdayaan yang akan berdampak pada keberdayaan para nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran Kota Surabaya. Berikut uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian sebagai berikut :

Perbaikan Pendidikan

Diketahui bahwa penduduk nelayan di kawasan pesisir pantai kenjeran, tingkat pendidikannya sebagian besar hanya lulusan SD/Sederajat dan beberapa mulai disusul lulusan SMP/Sederajat. Artinya indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah dalam bidang pendidikan. Hal ini berdampak pada tingkat keterampilan dan kemampuan kerja masyarakat nelayan pesisir. IPM sering digunakan untuk mengukur proses pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh setiap pemerintahan memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pemberantasan kemiskinan (Handalani, 2019).

Beberapa indikasi menunjukkan kemiskinan masyarakat nelayan biasanya terlihat pada kondisi permukiman kumuh, pendapatan yang tidak menentu, dan status pendidikan yang minim. Upaya yang dilakukan DKPP Kota Surabaya dalam perbaikan pendidikan terhadap masyarakat nelayan yakni dengan membuat program pengembangan SDM dalam melestarikan kekayaan sumber daya yang berkelanjutan serta mengembangkan masyarakat nelayan di wilayah pesisir agar bisa berkreatifitas. Hal ini sebagaimana mengacu pada Rencana Strategis DKPP Kota Surabaya Tahun 2021-2026 bahwa tujuan dari pengimplementasian pengembangan SDM adalah pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan kapasitas SDM. Pemberdayaan yang dilakukan menasar pada kelompok-kelompok nelayan misalnya seperti kelompok usaha bersama, anggota koperasi, atau nelayan pemilik kapal dan nelayan tanpa kapal. Dengan adanya pembinaan tersebut agar bisa meningkatkan perekonomian nelayan dan juga meningkatkan pendapatan daerah.

Program pengembangan SDM dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Program perbaikan pendidikan diwujudkan melalui kegiatan pembinaan keselamatan pelayaran bagi nelayan beserta pemberian bantuan kapal tangkap. Materi pembinaan meliputi pengetahuan praktis terkait pengurusan dokumen kapal, informasi cuaca maritim dan pembinaan keselamatan pelayaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran bagi nelayan serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk mewujudkan kesadaran tertib pelayaran. Sehingga nantinya mampu mewujudkan keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan di laut. Hasil penelitian Rahman et al., (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan masih minim pengetahuan keselamatan saat melaut dan masih belum sesuai standar nasional yang mengacu internasional. Oleh sebab itu, menurut Amrulloh et al., (2022), untuk meningkatkan produktivitas nelayan sangat perlu diterapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Akan tetapi, tidak semua nelayan mendapatkan arahan dan bimbingan dikarenakan kurangnya anggota pendamping lapangan.

Meskipun demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa DKPP Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan program pengembangan SDM terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya sasaran yang telah ditentukan yakni meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan terampil. Selain itu, pemberian bantuan kapal tangkap oleh DKPP Kota Surabaya juga digunakan secara maksimal oleh para nelayan.

Perbaikan Aksesibilitas

Pada perbaikan aksesibilitas difokuskan dengan melihat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan kawasan perikanan. Pemberdayaan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya dengan memprioritaskan perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran dikarenakan merupakan salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Seperti diketahui bahwa di wilayah pesisir pantai kenjeran terdapat infrastruktur SIB yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penjualan hasil tangkapan nelayan. Oleh karena itu, DKPP melakukan penataan terhadap wajah Kampung Baru Nelayan Bulak menjadi salah satu kampung destinasi wisata yang akan dikoneksikan dengan SIB sebagai strategi pengelolaan kawasan ekonomi perikanan pesisir

Dari segi pemasaran yang difokuskan pada SIB, keberadaannya masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Hal ini sebagaimana menurut Bogar (2009) dikutip Suwandi & Prihatin (2020) bahwa pada sistem pemasaran ikan nelayan skala kecil lebih didominasi pedagang pengumpul dan yang paling dominan menentukan harga ikan adalah pedagang pengumpul. Bahkan pada waktu hasil tangkapan nelayan melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu membelinya. Kondisi tersebut, sangat merugikan masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran.

Untuk membuka akses pemasaran bagi produk-produk usaha perikanan, DKPP Kota Surabaya mengupayakan dengan memfasilitasi atau mendekatkan masyarakat pesisir dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga eksportir komoditas perikanan. Peran Paguyuban Kelompok Nelayan sebagai perwakilan lembaga masyarakat nelayan sebagai wakil masyarakat juga diharapkan dapat aktif memfasilitasi hal tersebut. Keuntungan dari hubungan kerjasama seperti ini, masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan masyarakat terutama dalam hal meningkatkan kinerja produksi dan kualitas produk, serta mendapatkan penguatan modal bagi pengembangan usaha masyarakat pesisir.

Untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan perlu ditopang oleh berbagai hal diantaranya keamanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DKPP Kota Surabaya juga melakukan perbaikan pada akses kesehatan berupa program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bekerjasama dengan PT. Jasindo sebagai bentuk jaminan kesejahteraan nelayan. Program asuransi ini merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu

berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan hingga mencapai Rp. 200 juta merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya melalui DKPP kepada masyarakat sudah optimal. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, yang dimana nelayan sebagian besar ekonominya masih rendah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan aksesibilitas telah dilakukan dengan baik oleh DKPP Kota Surabaya dengan memfokuskan pada pengembangan akses pemasaran dan akses kesehatan. Dalam praktiknya, DKPP Kota Surabaya tidak berjalan sendiri melainkan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Paguyuban Kelompok Nelayan agar meningkatkan produksi dan kualitas produk, serta mendapatkan penguatan modal. Adanya kerjasama juga dilakukan dengan PT. Jasindo melalui program BPAN menegaskan komitmen DKPP meningkatkan dan mensejahterakan pendapatan nelayan.

Perbaikan Tindakan

Beragama tindakan dilakukan DKPP Kota Surabaya untuk memberdayakan para nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran Kota Surabaya dimulai dari perbaikan sarana dan prasarana seperti tempat berlabuh nelayan yang memudahkan para nelayan naik atau turun dari perahu hingga kegiatan aspirasi nelayan yang disuarakan oleh Paguyuban Kelompok Nelayan untuk mewakili keresahan nelayan yang lain.

Hasil kegiatan aspirasi nelayan ini menunjukkan bahwa beragam aspirasi mulai dari permodalan, pengembangan pemasaran, pembuangan limbah kerang, sarana dan prasarana bagi para nelayan, penataan lingkungan hingga para nelayan yang kesulitan mencari solar. Meningkatnya aspirasi nelayan juga didukung oleh kondisi wilayah pesisir pantai kenjeran yang relatif terjangkau dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Pada pembahasan aspirasi nelayan ini, peneliti hanya menguraikan aspirasi mengenai kebutuhan solar bagi nelayan. Hal ini mengingat pembahasan aspirasi lainnya akan dijelaskan pada indikator pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan lainnya.

Masyarakat nelayan menilai bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan Pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Pasalnya, tidak semua masyarakat lapisan bawah merasakan efek dari subsidi tersebut. Berdasarkan hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dikutip Safutra (2022) bahwa pada tahun 2021 ternyata 82 persen nelayan kecil tidak memiliki akses untuk mendapat BBM bersubsidi. Hal ini kemudian membuat para nelayan di wilayah pesisir kebingungan dalam menyiasati kebutuhan solar untuk melaut. Terlebih mayoritas perahu nelayan menggunakan solar.

Bahkan untuk membeli solar menggunakan jeriken atau drum di Pertamina juga masyarakat nelayan tidak boleh karena harus menggunakan surat rekomendasi dari DKPP Kota Surabaya. Pada akhirnya, harapan nelayan untuk bisa membeli solar di Pertamina diwujudkan oleh DKPP Kota Surabaya dengan memberikan surat rekomendasi. Menariknya, DKPP Kota Surabaya juga sedang mengupayakan agar

para nelayan mempunyai Pertamina di tengah laut namun hingga saat ini belum terealisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pada perbaikan tindakan telah dilakukan dengan cepat dan tanggap dalam menghadapi permasalahan nelayan. Walaupun terdapat wacana pembangunan Pertamina di tengah laut yang diinisiasi oleh DPRD Kota Surabaya, setidaknya aspirasi yang disampaikan Paguyuban Kelompok Nelayan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan solar melalui kegiatan aspirasi nelayan.

Perbaikan Kelembagaan

Dalam perbaikan kelembagaan dapat ditandai dengan terjadinya perbaikan atau melakukan perubahan pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan untuk memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Upaya perbaikan kelembagaan dilakukan melalui pengembangan Kampung Baru Nelayan atau disingkat menjadi Kabayan yang akan dikelola Paguyuban Kelompok Nelayan di bawah naungan DKPP Kota Surabaya. Dengan mengusung tema kampung baru nelayan berbasis potensi wilayah, kampung ini dirancang dengan konsep produksi dan wisata. Sehingga dalam proses operasionalnya, warga kampung nelayan memiliki aktivitas penuh dalam mencari, mengolah, dan memproduksi aneka olahan ikan dan hasil laut untuk kemudian produk tersebut dipasarkan pada pengunjung area wisata kampung nelayan kenjeran tersebut. Selain itu, masyarakat kampung nelayan kenjeran mampu merintis dan mengembangkan usaha mandiri dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang ada di wilayah tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan kawasan perikanan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan yang harus dirancang dan diproyeksikan sebagai basis industrialisasi kelautan dan perikanan, dengan pengertian bahwa daerah yang ditetapkan sebagai lokasi industrialisasi harus mengacu pada prinsip pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi antara hulu dan hilir. Industrialisasi kelautan dan perikanan dapat dimulai dari pengembangan sentra-sentra pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Bersamaan dengan itu kegiatan tersebut untuk mendorong penguatan struktur dan sistem produksi di bagian hulu diantaranya melalui modernisasi sistem produksi.

Selain wisata keluarga, kampung baru nelayan kenjeran ini juga dikonsepsikan sebagai wisata edukasi, sehingga pengunjung wisata kampung nelayan juga dapat melihat langsung dan mempelajari proses – proses produksi aneka hasil olahan ikan dan hasil laut dari usaha mandiri masyarakat kampung nelayan Kenjeran Surabaya. Dengan ini gagasan ide rancang kampung baru nelayan dapat menjadi fasilitas yang tepat dalam menjembatani antara potensi SDA dan SDM yang ada di wilayah pesisir pantai kenjeran dalam pengembangan kawasan perikanan. Konsep ini diangkat sebagai solusi dari permasalahan akan ketimpangan dan potensi yang belum dikembangkan secara maksimal.

Kampung baru nelayan ini akan dikelola oleh 9 kelompok nelayan KUB yang tersebar di Kecamatan Bulak. Tujuan dan fungsi adanya KUB ini dibentuk untuk koordinasi dan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan bagi para nelayan. Misalnya KUB diberi bantuan berupa perahu dari Pemkot Surabaya, maka pihak KUB menghubungi kepada koordinator paguyuban kelompok nelayan agar dapat menyalurkan bantuan secara adil. Selain itu juga memudahkan koordinasi dan komunikasi antar masyarakat nelayan yang ada. Fokus utamanya untuk memperbaiki kesejahteraan para nelayan melalui bantuan dari pemerintah.

Dalam pola ini, pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Bagi nelayan, kerjasama dalam bentuk kemitraan merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan usaha. Bantuan yang diberikan tidak hanya terbatas pada modal usaha tetapi penyuluhan maupun bimbingan dan pemasaran hasil produk. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, butir 4 bahwa kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa dalam kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan (Asiati, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya dari DKPP Kota Surabaya dengan pendekatan partisipatif. Dengan mengusung tema kampung baru nelayan berbasis potensi wilayah, kampung ini dirancang dengan konsep produksi dan wisata. Hal ini juga didukung dengan kemitraan usaha yang terencana dengan baik dalam hal pemasaran produksi di mana DKPP Kota Surabaya melakukan pembinaan, penyuluhan, maupun pelatihan dengan KUB di pesisir pantai kenjeran. Untuk saat ini perbaikan kelembagaan dan pengembangan kemitraan yang dilakukan oleh DKPP Kota Surabaya telah berjalan dengan baik dan memiliki kemitraan yang dapat mengembangkan manfaat dari keberadaan KUB kepada masyarakat nelayan.

Perbaikan Usaha

Setelah perbaikan kelembagaan yang terus dilakukan langkah selanjutnya upaya pengembangan kawasan perikanan yang dilakukan oleh DKPP Kota Surabaya yaitu melakukan perbaikan usaha. Hal ini menjadi suatu upaya yang penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat nelayan. Langkah DKPP Kota Surabaya untuk berkomitmen dalam mewujudkan pengembangan kawasan perikanan dengan memberikan berbagai bantuan mulai dari perahu wisata untuk 5 (lima) KUB di kawasan kampung baru nelayan dan 200 paket yang setiap paket jaring berisi 7 unit barang yaitu pelampung, timah pemberat, tali ris atas, tali pelampung, tali ris bawah, tali pemberat dan jaring monofilament. Selain itu, juga dilakukan penataan di kawasan kampung baru nelayan di mana pada lokasi penjemuran ikan yang biasa

dilakukan di pinggir jalan, telah diganti melalui mesin pengering ikan. Dengan bantuan ini harapannya nelayan dapat terbantu dan bisa meningkatkan hasil tangkapannya sehingga perekonomian nelayan dapat meningkat.

Terkait kendala yang dirasakan oleh para nelayan yakni faktor pembatas nelayan terhadap kondisi cuaca yang berdampak pada nelayan tidak dapat lagi melakukan aktivitas penangkapan ikan pada cuaca yang tidak baik.. DKPP Kota Surabaya terus mengupayakan pengembangan perekonomian di berbagai sektor lewat stimulus buat para nelayan di pesisir pantai kenjeran berupa bantuan diversifikasi. Untuk mendapatkan bantuan diversifikasi, setiap KUB bisa mengajukan bantuan melalui petugas penyuluh lapangan (PPL) dan diteruskan ke kelurahan setempat. Setelah itu, akan diteruskan ke DKPP. Selain itu, DKPP juga terus melakukan survei lapangan kepada nelayan. Survei itu terkait kebutuhan para nelayan, supaya bantuan yang disalurkan sesuai kebutuhan serta terus melakukan pendampingan kepada nelayan.

Dalam bantuan diversifikasi, para nelayan memperoleh bantuan kolam bundar, bibit ikan, dan sarana pompa serta diharuskan untuk mengikuti kegiatan diversifikasi. Dua puluh nelayan menjadi peserta dan mengikuti seluruh kegiatan dengan sangat antusias dan aktif. Ada dua materi yang disampaikan guna meningkatkan pengetahuan nelayan, antara lain literasi digital dan produk inovasi pangan. Pada tahap akhir, seluruh peserta dilatih untuk membuat beberapa produk diversifikasi pangan berbasis hasil perikanan seperti bakso ikan, nugget, dan stik ikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Feliatra et al., (2022), bahwa pengembangan teknologi diversifikasi pangan berbasis hasil perikanan di beberapa wilayah pesisir telah mulai dilakukan. Teknologi ini memiliki prospek ekonomi yang cukup menjanjikan. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan ini memberi banyak manfaat bagi sebagian besar nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran. Dari kegiatan ini, pengetahuan baru yang didapat para nelayan dapat membuat mereka lebih semangat dan termotivasi untuk memulai usaha baru guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perbaikan usaha terdapat berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya mulai dari sektor perikanan tangkap berupa bantuan alat perahu wisata, paket jaring, mesin pengering ikan hingga sektor perikanan budidaya berupa bantuan diversifikasi untuk stimulus para nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran. Bantuan-bantuan tersebut diberikan kepada KUB yang menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan perikanan di mana Kampung Baru Nelayan sebagai wisata edukasi sehingga pengunjung wisata kampung nelayan juga dapat melihat langsung dan mempelajari proses produksi aneka hasil olahan ikan dan hasil laut dari usaha mandiri masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran.

Perbaikan Pendapatan

Perbaikan usaha yang dilakukan diharapkan dapat berpengaruh untuk memperbaiki pendapatan yang diperoleh dari masyarakat. Dalam perbaikan pendapatan, para nelayan masih memiliki masalah permodalan. Permasalahan

tersebut kerap kali menjadi kendala bagi masyarakat nelayan. Sulitnya akses, persyaratan yang berbelit-belit hingga ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga pendanaan menjadi beberapa faktor nelayan enggan mengurus kredit bergulir. Ketergantungan nelayan terhadap permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga ataupun dari sumber keuangan informal lainnya masih sangat tinggi terjadi di kalangan nelayan.

Hampir 85 persen pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia berskala mikro dan kecil. Banyaknya pelaku usaha kecil ini, tentu menjadi perhatian pemerintah untuk tercapainya agenda ketujuh Nawa Cita yang telah digagas oleh Presiden RI Joko Widodo, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestic (Sujinah et al., 2020). Kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak meratanya perkembangan KUB di wilayah pesisir pantai kenjeran yang menunjukkan adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi KUB antar KUB satu dengan KUB lainnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, DKPP Kota Surabaya melakukan pembiayaan mikro bagi nelayan menjawab dan memberikan solusi mudah permodalan bagi masyarakat nelayan. Fasilitasi bantuan pendanaan bagi nelayan kecil ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. DKPP Kota Surabaya gencar memberikan sosialisasi fasilitasi permodalan untuk nelayan di pesisir pantai kenjeran untuk mendorong pemberdayaan nelayan. Fasilitasi bersama penyedia modal usaha pun terus dilakukan agar para nelayan dapat terbantu mendapat modal usaha dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan nelayan ini para nelayan dapat termotivasi untuk terus melakukan aktivitas perikanan tangkap. Terlebih saat ini, Pemerintah menjalankan program Kampung Baru Nelayan dengan konsep produksi dan wisata. Sebanyak 200 orang nelayan di masing-masing lokasi mendapatkan sosialisasi, bimbingan teknis dan gerai fasilitasi. Mulai dari perawatan armada kapal perikanan hingga modifikasi alat penangkapan ikan, akses permodalan dan upaya pengembangan mata pencaharian alternatif sebagai bentuk usaha kecil keluarga nelayan. Para nelayan juga mendapatkan sejumlah bantuan diantaranya paket sembako, perlengkapan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan berupa peralatan perbengkelan dan olahan ikan, penyaluran kredit usaha rakyat oleh Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI, perangkat Laut Nusantara dan router gerakan donasi kuota (GDK) dari PT XL Axiata, tabungan emas senilai dari PT Pegadaian dan sertipikat hak atas nelayan.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar KUB di wilayah pesisir pantai kenjeran sehingga menghambat proses perbaikan pendapatan pada masyarakat nelayan. Padahal menurut Suwandi & Prihatin (2020) bahwa peran KUB adalah meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan pendapatan nelayan. Sebagai kelompok masyarakat, KUB seharusnya mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang

dihadapi mereka secara mandiri dan juga berkelanjutan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan KUB di wilayah pesisir pantai kenjeran yang belum berperan untuk meningkatkan pendapatan bukan hanya anggota kelompoknya, tapi juga masyarakat sekitar.

Dapat disimpulkan bahwa untuk perbaikan pendapatan belum berjalan dengan baik. Meskipun telah dilakukan langkah preventif oleh DKPP Kota Surabaya dengan memfasilitasi permodalan untuk nelayan yang bekerja dengan penyedia modal baik BLU LPMUKP, perbankan seperti Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI, pegadaian ke sentra nelayan seperti perangkat Laut Nusantara dan router gerakan donasi kuota (GDK) dari PT XL Axiata, tabungan emas senilai dari PT Pegadaian dan sertipikat hak atas (SeHAT) nelayan. Faktor tidak meratanya pertumbuhan ekonomi KUB di wilayah pesisir pantai kenjeran dan tidak berfungsinya lembaga KUB menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Perbaikan Lingkungan

Dengan adanya perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh fasilitas yang kurang layak dan memadai. DKPP Kota Surabaya melakukan upaya untuk melakukan pemberdayaan nelayan sehingga dapat membantu mengubah kondisi lingkungan baik fisik maupun sosial dalam pengembangan kawasan perikanan. Segala potensi yang ada di wilayah pesisir pantai kenjeran yang kemudian menjadi perhatian DKPP Kota Surabaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan.

Wujud dari perhatian tersebut adalah adanya kebijakan program penataan kawasan nelayan yang ditandai dengan perbaikan lingkungan fisik mulai dari jalan-jalan di setiap gang kampung pesisir kini dipaving. Beberapa bunga menghiasi kirikan jalan, pembiasaan budaya warga untuk tidak buang air besar sembarangan dengan adanya di setiap gang juga dilengkapi toilet umum untuk warga. Kelurahan Sukolilo Baru, Kelurahan Kenjeran, dan Kelurahan Kedung Cowek merupakan salah satu kawasan pesisir yang sudah berbenah. Meski belum tampak begitu asri, namun kawasan ini sudah mulai tertata rapi. Warga sekitar yang dikenal pengolah ikan kering ini tak lagi menjemur ikan di jalan-jalan, terdapat tempat penjemuran ikan asin yang dibangun Pemkot Surabaya sebagai fasilitas bagi para nelayan. Selain itu ada lapangan futsal untuk main anak-anak nelayan.

Begitu juga di Kampung Bulak, Kelurahan Kenjeran telah dibangun taman yang juga terdapat patung Suro dan Boyo yang lebih besar sebagai ikon kota Surabaya seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS). Tidak hanya itu, juga dibangun gedung pertemuan serbaguna di kampung Cumpat, tempat perebusan kerang, plengsengan tanggul kampung nelayan, serta lapangan futsal di Nambangan. Sebanyak 50 rumah warga tak mampu juga dibangun WC. Bagi rumah nelayan yang kurang mampu, akan diberikan program bedah rumah senilai Rp10 juta. Disamping itu, juga telah dibangunnya tanggul laut dan dermaga kecil untuk para nelayan di bawah jembatan Suroboyo untuk menarik wisatawan bisa melihat aktivitas nelayan menangkap ikan, mengolah hasil tangkapan.

Selain menata lingkungan pemukiman, sosialisasi model cangkrukan juga terus dilakukan. Hal tersebut agar perubahan pola lingkungan lebih mudah bagi para nelayan. Menariknya, penataan kampung nelayan ini di kawasan pesisir pantai kenjeran ini tidak dilakukan dengan menggusur rumah, melainkan memperbaiki lingkungan, sosial dan kebiasaan untuk hidup sehat. Hal ini selaras dengan pendapat Payne yang dikutip oleh Suwandi & Prihatin (2020) mengatakan bahwa pemberdayaan dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kuasa atas hidup mereka sendiri dengan meminimalisir dampak dari blokade sosial dan personal dari kekuatan yang sudah ada dengan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kuasa mereka dan dengan melakukan transfer kekuasaan dari lingkungan kepada klien. Konsep pemberdayaan ini dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

Akan tetapi, jika melihat fasilitas lingkungan lainnya yaitu limbah buangan sisa hasil laut sangat mengganggu. Limbah itu berupa kulit kerang yang jumlahnya terus meningkat. Di kampung Bulak, Kenjeran, sebagai kawasan di wilayah pantai, masyarakat mayoritas hidup sebagai nelayan. Di antara mereka menangkap ikan, dan sebagian lagi mereka mencari kerang. Untuk mendapatkan kerang mereka harus menyelam. Maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat umum lainnya. Lingkungan ini tidak menarik menjadi bagian pemandangan tempat yang dipromosikan sebagai destinasi wisata. Perlahan, apabila tak juga mendapatkan solusi, kondisi ini tidak menyehatkan dan mengganggu lingkungan. Maka dapat menimbulkan dampak negatif dalam pengembangan kawasan perikanan.

Upaya yang dilakukan KUB dalam mengatasi limbah kulit kerang adalah meleburnya dan menjadikan pakan ternak, namun kendalanya adalah jumlah mesin penghancur cangkang itu masih sangat terbatas sehingga daya serapan sangat sedikit sehingga membuat penumpukan limbah kerang di sekitar pemukiman warga semakin tidak terkendali. Akibat lanjutannya adalah berpengaruh pada polusi udara, bau tidak sedap yang mengundang datangnya tikus dan serangga. Selain itu, penumpukan kulit kerang ini juga menjadi sarang hidup Bakteri Coli dan nyamuk yang mengakibatkan diare dan demam berdarah. Padahal hal tersebut seharusnya dapat menjadi peluang mengingat sebagaimana menurut Witarsa (2015), ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dipertegas Iswari et al., (2019), bahwa disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, juga bertujuan untuk mendidik agar nelayan lebih mandiri dan mempunyai kemampuan untuk hidup lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh DKPP Kota Surabaya belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat berbagai upaya pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program penataan kampung nelayan di pesisir kenjeran dengan memperhatikan kearifan lokal nelayan. Akan tetapi minimnya sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya dalam

hal tempat pembuangan limbah kerang serta tempat pengupasan kerang bagi nelayan menjadi permasalahan yang cukup serius yang dapat mengganggu kesehatan para nelayan.

Perbaikan Kehidupan

Menurut Mardikanto & Soebianto (2017:202) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Adanya tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Upaya perbaikan kehidupan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya dalam pengembangan kawasan perikanan dengan berfokus pada sektor perikanan baik secara budidaya atau perairan umum.

Hal tersebut dikarenakan data produksi perikanan Kota Surabaya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya di mana pada tahun 2021 sebanyak 7.179,60 ton, kemudian di tahun 2022 meningkat sebanyak 7.592,50 ton. Apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan konsumsi ikan masyarakat setiap tahunnya, tentu hasil produksi lokal tersebut tidak selaras dengan kebutuhan konsumsi ikan sebanyak 44.673,84 ton. Artinya bahwa antara hasil produksi perikanan dan kebutuhan konsumsi ikan menunjukkan *gap* hampir 3x lipat, hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan di mana dari jumlah nelayan pada tahun 2022 sebanyak 1.951 jiwa, hanya 250 nelayan yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 telah dijelaskan mengenai sarana dan prasarana penunjang kawasan pengembangan perikanan yang mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Masyarakat pesisir di pantai kenjeran umumnya tidak berdaya, kehidupannya serba kurang, dan cenderung sulit untuk terlibat kedalam sektor – sektor yang membuat mereka dapat menjadikan dirinya ke tingkatan hidup yang sejahtera, sedangkan untuk bertahan dalam kehidupan fisiknya pada tingkatan yang tersistem bagi keluarga miskin hampir menjadi sebuah hal yang tidak mungkin bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya. Faktor yang disebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Kondisi tersebut diperparah dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh nelayan hingga saat ini sebagian besar tidak dalam keadaan layak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator perbaikan kehidupan, masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran belum merasakan adanya perbaikan kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat upaya pemberdayaan masyarakat oleh DKPP Kota Surabaya melalui program-program pengembangan

kawasan perikanan, akan tetapi dalam kondisi realita di lapangan pada dasarnya ialah kurangnya kesadaran nelayan terhadap manfaat dari fasilitas yang telah diberikan menjadi faktor utama penyebab masyarakat belum merasakan perbaikan kehidupan sehingga masyarakat nelayan pesisir mengalami keterisolasian.

Perbaikan Masyarakat

Adanya kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Berdasarkan data dari BPS Kota Surabaya (2022), menunjukkan jumlah keluarga miskin di kawasan pesisir pantai kenjeran sebanyak 1.471 atau 8,64 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di kawasan pesisir pantai kenjeran masih tinggi tingkat kemiskinannya. Menariknya, bahwa keluarga miskin tersebut rata-rata didominasi oleh masyarakat nelayan.

Kondisi tersebut selaras dengan studi yang dilakukan oleh Gai (2020), permasalahan sosial, ekonomi dan ekologi pada kawasan pesisir merupakan permasalahan penting yang terikat satu sama lain. Salah satunya adalah keterkaitan faktor kemiskinan dan faktor pengelolaan lingkungan. Kondisi ini terjadi pada kawasan pesisir di Kota Surabaya. Profil perikanan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya pada tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan dan akses sumber daya manusia di kawasan pesisir rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan nelayan di pesisir timur Kota Surabaya, sebanyak 29,30% masih dibawah UMK Kota Surabaya.

Diketahui informasi bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Bulak, utamanya di Kelurahan Kedung Cowek, Kenjeran, dan Bulak sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan dan pekerjaan yang memanfaatkan ruang laut serta pesisir. Namun di Kelurahan Sukolilo Baru hanya 3 RW yang bermatapencaharian sebagai nelayan/kampung nelayan karena karakteristik lokasinya ada di tepian pesisir Pantai Kenjeran. Sebagaimana sisanya adalah kompleks perumahan Militer dan juga Perumahan yang mata pencaharian penduduknya tidak berorientasi terhadap pemanfaatan ruang laut.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, DKPP Kota Surabaya belum bisa memberikan perbaikan masyarakat secara menyeluruh, namun terdapat upaya yang dilakukan untuk membuat lingkungan masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif dengan membuat program kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, diskusi, dan program budidaya perikanan laut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya nelayan dalam menggali potensi sumber daya kelautan, Misalnya, mereka bisa eksploitasi teripang dan budidaya kerang mutiara serta rumput laut. Potensi/sumber daya yang dimiliki oleh daerah pesisir pantai kenjeran yaitu: sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi: ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya nonhayati meliputi: pasir, air laut, mineral dasar laut (Prasetyo et al., 2021). Dilihat dari berbagai potensinya, daerah pesisir pantai kenjeran sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024, terdapat laporan ketercapaian indikator Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang menunjukkan bahwa jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pelatihan dilakukan selama 8 kali, kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat 2x lipat menjadi sebanyak 18 kali. Adapun di tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yakni dilakukan sebanyak 15 kali. Akan tetapi, jumlah pelatihan tersebut meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 32 kali. Tahun 2023 saat ini ditargetkan pelatihan dilakukan sebanyak 34 kali. Pelatihan tersebut dilakukan mengingat sektor budidaya kelautan Indonesia saat ini jauh dari kebutuhan domestik dan ekspor sehingga nelayan didorong untuk memanfaatkan keramba apung yang dapat menghasilkan jenis-jenis ikan mahal seperti ikan kerapu dan tuna.

Dalam proses pelatihan sendiri, tidak terlepas dari kendala yang terletak pada sumber daya masyarakat nelayan di mana masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran belum mampu memanfaatkan teknologi yang dinilai lebih efisien dalam pengembangan budidaya ikan laut. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi hasil persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif yang menunjukkan pada tahun 2022 menghasilkan persentase sebesar 60 persen atau tercapai dan persentase peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan sebesar 2,5 persen atau tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan telah merasakan adanya perbaikan masyarakat. Meskipun pada indikator perbaikan lingkungan belum berjalan dengan baik dan indikator perbaikan kehidupan belum ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran dalam pengolahan hasil ikan yang produktif menunjukkan ketercapaian target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas upaya komprehensif dan terpadu melalui program pelatihan budidaya perikanan laut yang dilakukan DKPP Kota Surabaya. Pelatihan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat nelayan setempat dalam mengelolah hasil laut guna meningkatkan pendapatan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perbaikan Pendidikan, Perbaikan pendidikan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya melalui program pengembangan SDM dalam melestarikan kekayaan sumber daya yang berkelanjutan serta mengembangkan masyarakat agar bisa berkreatifitas. Perbaikan ini dilakukan dengan baik ditandai dengan meningkatnya jumlah nelayan yang terampil serta pemberian bantuan kapal tangkap yang dapat digunakan dengan optimal.

Perbaikan Aksesibilitas, Perbaikan aksesibilitas yang dilakukan DKPP Kota Surabaya dengan berfokus pada pengembangan akses pemasaran melalui penataan Kampung Baru Nelayan Bulak yang dikoneksikan dengan Sentra Ikan Bulak (SIB) Kota Surabaya serta mendekatkan masyarakat pesisir dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga eksportir komoditas perikanan. Selain itu, perbaikan juga dilakukan dalam akses kesehatan melalui program BPAN yang bekerjasama dengan PT. Jasindo sebagai bentuk jaminan kesejahteraan nelayan.

Perbaikan Tindakan, Perbaikan tindakan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya melalui kegiatan aspirasi nelayan. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi DPRD Kota Surabaya yang menysasar Paguyuban Kelompok Nelayan. Aspirasi yang disampaikan terkait permasalahan yang dialami oleh para nelayan di wilayah pesisir salah satunya yaitu sulitnya memperoleh solar untuk kebutuhan melaut. Aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan baik dengan memberikan surat rekomendasi agar nelayan dapat membeli solar di Pertamina.

Perbaikan Kelembagaan, Perbaikan kelembagaan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya dilakukan melalui gagasan konsep kampung baru nelayan berbasis potensi wilayah, kampung ini dirancang dengan konsep produksi dan wisata. Dalam praktiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang berjalan dengan baik. Hal tersebut juga didukung dengan kemitraan usaha yang terencana dengan baik dalam hal pemasaran produksi di mana DKPP Kota Surabaya melakukan pembinaan, penyuluhan, maupun pelatihan dengan KUB di kawasan pesisir pantai kenjeran.

Perbaikan Usaha, Perbaikan usaha yang dilakukan DKPP Kota Surabaya mulai dari sektor perikanan tangkap berupa bantuan alat perahu wisata, paket jaring, mesin pengering ikan hingga sektor perikanan budidaya berupa bantuan diversifikasi untuk stimulus para nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran. Bantuan-bantuan tersebut diberikan kepada KUB yang menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan perikanan di mana kampung baru nelayan sebagai wisata edukasi sehingga pengunjung wisata juga dapat melihat langsung dan mempelajari proses produksi aneka hasil olahan ikan dan hasil laut dari usaha mandiri masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai kenjeran.

Perbaikan Pendapatan, Perbaikan pendapatan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya belum dirasakan oleh masyarakat nelayan. Meskipun telah dilakukan langkah preventif dengan memfasilitasi permodalan untuk nelayan yang bekerja dengan penyedia modal. Faktor tidak meratanya pertumbuhan ekonomi KUB di wilayah pesisir pantai kenjeran dan tidak berfungsinya lembaga KUB menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Perbaikan Lingkungan, Perbaikan lingkungan yang dilakukan DKPP Kota Surabaya juga belum dirasakan oleh masyarakat nelayan. Meskipun telah dilakukan perbaikan lingkungan fisik oleh DKPP Kota Surabaya melalui program penataan kampung nelayan dengan memperhatikan kearifan lokal nelayan. Namun, minimnya sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya dalam hal tempat pembuangan limbah kerang serta tempat pengupasan kerang menjadi permasalahan utama yang dapat mengganggu kesehatan para nelayan.

Perbaikan Kehidupan, Perbaikan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan. Adanya kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang sebagian besar tidak layak sehingga terjadi kesenjangan antara hasil produksi perikanan dan kebutuhan konsumsi ikan telah diupayakan DKPP Kota Surabaya melalui program-program pengembangan kawasan perikanan seperti pengembangan SDM, pengembangan akses pemasaran, jaminan kesehatan, kampung baru nelayan, dan bantuan diversifikasi.

Perbaikan Masyarakat, Meskipun pada indikator perbaikan lingkungan belum berjalan dengan baik dan indikator perbaikan kehidupan belum ditunjang dengan infrastruktur nelayan yang memadai. Akan tetapi, perbaikan masyarakat dapat dirasakan dibuktikan dengan pengolahan hasil ikan yang produktif yang menunjukkan ketercapaian target yang telah ditentukan melalui pelatihan budidaya perikanan laut yang dilakukan DKPP Kota Surabaya

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara umum pemberdayaan nelayan pesisir pantai kenjeran oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam pengembangan kawasan perikanan pada proses pemberdayaan yang dilakukan telah dianggap cukup berhasil, mampu meningkatkan hasil tangkapan para nelayan sehingga sangat membantu para nelayan dan bisa mensejahterakan nelayan pada umumnya meskipun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, H. N., K, M. D., Handoko, L., Rochmawati, N. W., S, S. Y., Kerja, T. K., Perkapalan, P., & Surabaya, N. (2022). Pengenalan Budaya Keselamatan Kerja dalam Kegiatan Melaut Nelayan Desa Kalibuntu Probolinggo untuk Meningkatkan Keselamatan Bekerja Pendahuluan. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 8(2), 93–99. <https://doi.org/10.31940/bp.v8i2.93-99>
- Anwar, Zakariya, & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia. *Sosioreligius*, 1(4).
- Asiati, D. (2016). Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 103–118. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.204>
- Beritasurabaya.net. (2022). *Surabaya Tambah Pasar Ikan di Bulak*. http://www.beritasurabaya.net/index_sub.php?category=13&id=8233
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2).
- Databoks. (2022). *Jumlah Nelayan Budidaya di Indonesia Merosot 10,44% pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/jumlah-nelayan-budidaya-di-indonesia-merosot-1044-pada-2020#:~:text=Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan,sebanyak 2%2C49 juta orang>.
- DKPP Kota Surabaya. (2018). *Potensi Wilayah Pesisir Kota Surabaya*. <https://dkpp.surabaya.go.id/blog>

- DKPP Kota Surabaya. (2022). *Potensi Daerah Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan di Kota Surabaya*. <https://dkpp.surabaya.go.id/artikel/potensi-daerah-hasil-produksi-sektor-perikanan-dan-kelautan-di-kota-surabaya.html>
- Dkpp.surabaya.go.id. (2022). *DKPP Menyalurkan Bantuan Berupa Paket Jaring Tangkap Di Nelayan*. Website Resmi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya. <https://dkpp.surabaya.go.id/artikel/dkpp-menyalurkan-bantuan-berupa-paket-jaring-tangkap-di-nelayan.html>
- Fakhrudin, M. (2018). Strategi Adaptasi Pedagang Di Sentra Ikan Bulak Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 62–72.
- Fauzuddin, Y., Murti, A. B., Karlin, K., & Iswoyo, A. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Ibu-Ibu Rumah Tangga Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 1230–1239. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.489>
- Feliatra, F., Batubara, U. M., Kurnia, P., Lukistyowati, I., & Ghazali, T. M. (2022). Peningkatan Pendapatan Nelayan Di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis Melalui Teknologi Diversifikasi Pangan Berbahan Dasar Hasil Perikanan. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 2(2), 70–77. <https://doi.org/10.31258/cers.2.2.70-77>
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus. (2020). Konsep Pemberdayaan Nelayan Pesisir Kota Surabaya Sebagai Bentuk Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Sustainable Livelihood. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 45–51. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.2153>
- Handalani, R. T. (2019). Determinant of Poverty in Indonesian's Province: A Review of Public Policy. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 59–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.373>
- Hosana, N., Julistiono, K., & Hons, M. D. S. (2017). Kampung Nelayan Vertikal di Surabaya. *Jurnal E-Dimensi Arsitektur*, 5(1), 25–32.
- Irwan, W., Susanti, A., Kornelius, Y., & Putra, F. H. A. (2017). Studi Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. *Prosiding Seminar Nasional KSP2K II*, 2(1), 73–88.
- Kampungberita.id. (2022). *Program Pemberdayaan Disetop Dinas KPP, Nelayan Surabaya Tagih Janji Wali Kota*. <https://kampungberita.id/program-pemberdayaan-disetop-dinas-kpp-nelayan-surabaya-tagih-janji-wali-kota/>
- Kompas.com. (2022). *Degradasi Profesi Nelayan: Menelik Strategi Pemkot Surabaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Pesisir dan Nelayan yang Masih Belum Sustainable* Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Degradasi Profesi Nelayan: Menelik Strategi Pemkot Surabaya". <https://www.kompasiana.com/azzrr0761/6342efaede3f22680d06ef62/deg-radasi-profesi-nelayan-menelik-strategi-pemkot-surabaya-dalam->

memberdayakan-masyarakat-pesisir-dan-nelayan-yang-masih-belum-sustainable

- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (4th ed.). Alfabeta.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan, (2011).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Oktaviana, R. (2020). *Pemberdayaan Kawasan Ekonomi Perikanan: Kecamatan Bulak - Kelurahan Kalisari - Surabaya*. Tesis ITS Surabaya.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 Tentang Minapolitan, Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perikanan, (2012).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
- Prasetyo, M. A., Musta'in, M., & Ikhwan, H. (2021). Pemberdayaan Potensi Wisata Pantai Kenjeran Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 2-7. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.57116>
- Sujinah, Prasetyawati, D., Wahyudi, D., & Kurniawati, I. (2020). Gambaran Kampung Nelayan Kenjeran Surabaya. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57-63. <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.8056>
- Surabaya.bisnis.com. (2021). *Nelayan Pesisir Surabaya Bakal Diintervensi Program Ekonomi*. Kabar Jatim. <https://surabaya.bisnis.com/read/20211231/531/1483942/nelayan-pesisir-surabaya-bakal-diintervensi-program-ekonomi>
- Suryadi, A. M., & Sufi. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118-140. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>
- Suryawati, S. H., Purnomo, A. H., Radjawane, I. M., & Sembiring, K. O. (2015). *Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir: Konsepsi Dan Aplikasi Strategi Adaptasi*. ITB.
- Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui "Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra" di Jepara, Indonesia. *JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 10(2), 231-255. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/9451>

- Triyanti, R., & Firdaus, M. (2016). Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(1), 29-43. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3170>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- Waris, I., Susanti, A., Kornelius, Y., & Putra, F. H. A. (2018). Studi Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. *Prosiding Seminar Nasional KSP2K II*, 1(2), 73-88.
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 2(3), 793-804. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.764>
- Witarsa, W. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Economia*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.21831/economia.v11i1.7752>